

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Turki merupakan negara sekuler yang menerapkan sistem politik demokrasi di Timur Tengah. Setelah Perang Dingin berakhir, Turki dipandang negara-negara Barat sebagai oasis kestabilan di tengah-tengah ketidakstabilan negara-negara yang ada di sekitarnya. Namun, ada masalah yang terus-menerus ada dan memunculkan konflik di Turki yaitu masalah dengan etnis Kurdi.

Menurut Profesor Mehrdad R. Izady, seorang pakar Kurdi dari Universitas Harvard, setidaknya sejak kurun pertama Masehi, istilah “Kurd” mulai umum dipakai untuk menyebut siapa saja yang mendiami wilayah pegunungan dari Hormuz hingga Anatolia.

Etnis Kurdi sebagian besar tersebar di empat negara yaitu Turki, Irak, Iran, dan Suriah serta sebagian kecil tersebar di beberapa negara di Asia, Eropa dan Amerika. Ke empat negara yang memiliki populasi etnis Kurdi yang cukup besar tersebut menghadapi masalah yang sama dalam menghadapi etnis Kurdi.

Berdasarkan data dari CIA, jumlah populasi etnis Kurdi di Turki mencakup 20% dari total populasi penduduk di Turki, 15-20% di Irak, 8% di Suriah, 7% di Iran dan 1.3% di Armenia. Di antara semua negara tersebut kecuali Iran, etnis Kurdi merupakan etnis kedua terbesar yang ada di tiap negara di atas. Jumlah kasar dari populasi etnis Kurdi di dunia adalah 55% berdiam di Turki, sisanya masing-masing 20% di Iran dan Irak, dan sekitar lebih dari 5% di Suriah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah total etnis Kurdi secara keseluruhan sekitar 27 sampai 36 juta jiwa.

Bahkan diperkirakan jumlah populasi etnis Kurdi lebih dari apa yang telah disebutkan di atas. Tantangan demografis lain bagi Turki dan negara lain yang didiami oleh etnis Kurdi adalah tingkat kelahiran etnis Kurdi sekitar 50% lebih tinggi daripada etnis mayoritas di keempat negara tersebut.

Selain populasinya yang cukup signifikan, etnis Kurdi memiliki bahasa dan kebudayaan sendiri dan merupakan suatu kelompok besar dengan sistem sosial yang sangat bervariasi. Etnis Kurdi tidak dapat digolongkan sebagai bangsa Arab, Persia maupun Turki. Etnis Kurdi berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa. Mereka dikenal sebagai suku yang mendiami daerah pegunungan di perbatasan Iraq, Iran dan Turki sejak 8000 tahun yang lalu.

Etnis Kurdi dengan populasi 27-37.5 juta jiwa di seluruh dunia dengan lebih dari 20 juta jiwa di Turki, Irak, Iran dan Suriah bermukim di kawasan pegunungan yang membentang di sepanjang keempat negara tersebut tidak pernah merasakan hidup dalam satu negara sendiri dan tidak mempunyai perbatasan resmi. Sehingga orang-orang Kurdi sering mendapat sebutan sebagai bangsa tanpa negara (*a nation without a state*).

Keinginan etnis Kurdi untuk diakui sebagai bangsa yang dapat mendirikan negara sendiri berdasarkan latar belakang etnis yang mereka miliki mendapat tantangan keras dari pemerintah negara-negara di mana komunitas Kurdi tinggal. Kelompok elit di keempat negara yang didiami etnis Kurdi berusaha keras untuk menjadikan mereka bagian dari negara nasional (*nation-state*). Di masing-masing negara tersebut terdapat satu kelompok etnis yang dominan yaitu bangsa Turki, Arab atau Persia dan pemerintahnya menjalankan kebijakan yang bertujuan agar terjadi pembauran antar kelompok-kelompok etnis yang dominan ini dengan kelompok etnis minoritas agar terciptanya "kesatuan nasional". Keberadaan identitas etnis Kurdi yang terpisah, ditambah dengan adanya suatu gerakan nasional Kurdi di semua negeri dianggap sebagai ancaman besar bukan hanya bagi keamanan negara tetapi juga untuk identitas negara yang telah mereka ciptakan.

Di antara negara-negara lainnya, Turki lah yang paling radikal menentang upaya pembentukan bangsa (*nation-building*) Kurdi dan sangat aktif dalam upaya menghapus identitas nasional etnis Kurdi. Hal ini nampak

dari beberapa kebijakan represif pemerintah Turki untuk melarang penggunaan bahasa, budaya dan adat lain selain adat Turki.

Negara Turki sendiri merupakan entitas yang unik baik dari posisi geografi yang menghubungkan dua benua yaitu benua Asia dan Eropa, juga merupakan salah satu bentuk percampuran budaya, ideologi, dan sistem sosial Barat dan Timur. Sejarah panjang yang telah dilalui oleh bangsa Turki baik kegemilangan maupun kegelapannya menempatkan Turki sebagai salah satu negara-bangsa yang istimewa dalam percaturan dunia.

Masa kegemilangan Turki runtuh ditandai dengan runtuhnya salah satu kekaisaran besar yang pernah ada, yakni Kekaisaran Ottoman (Bani Utsmani) pada akhir Perang Dunia I. Kekalahan Turki ini dimanfaatkan oleh etnis Kurdi yang selama kurun waktu tersebut berada di bawah kekuasaan bangsa Turki untuk menuntut kemerdekaannya. Tuntutan etnis Kurdi atas tanah air yang merdeka diakui dalam Perjanjian Sevres (1920) dan didukung oleh janji-janji dari hasil perundingan di Paris dan London. Namun dalam kenyataannya janji-janji tersebut tidak pernah terealisasi. Perjanjian tersebut kemudian dinegosiasi ulang di Lausanne (1923) dengan hasil yang tidak menguntungkan etnis Kurdi, yakni dengan ditolaknya tuntutan mereka oleh pihak-pihak yang terlibat perundingan.

Kalangan Kurdi berkeyakinan bahwa Perjanjian Sevres menjamin pemberian otonomi yang luas bagi etnis Kurdi dan memberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Perjanjian yang menyatakan ” ... *a scheme of local autonomy for the predominantly Kurdish areas lying east of the Euphrates,* ” tersebut, oleh etnis Kurdi dijadikan pegangan untuk dibuatkan naskah yang akan menguatkan keberadaan etnis Kurdi di kawasan dengan otonomi luas.

Menyikapi dampak yang akan muncul dari perjuangan etnis Kurdi, Pemerintah Turki menerapkan strategi dan kebijakan khusus untuk menghambat tumbuhnya gerakan perjuangan dari etnis Kurdi untuk memerdekakan diri di antaranya dengan melarang penggunaan bahasa dan juga budaya Kurdi dalam kehidupan sehari-hari.

Adaptasi atau reaksi penolakan etnis Kurdi atas kebijakan-kebijakan Pemerintah Turki mempengaruhi hubungan kedua belah pihak. Dampak dari interaksi keduanya dapat memunculkan konflik atau justru konflik dapat dieliminir karena adaptasi yang baik oleh etnis Kurdi atas kebijakan yang berlaku di Turki. Aspek inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Fokus Masalah Dan Pertanyaan Penelitian

Penyebaran populasi etnis Kurdi di empat negara, menempatkan konflik Kurdi sebagai salah satu jenis konflik etnis yang melibatkan banyak negara, sehingga penanganan masalahnya menjadi khusus dan menarik untuk dikaji. Dalam kasus di Turki, dengan adanya kebijakan khusus kepada etnis Kurdi misalnya ada pelarangan penggunaan bahasa dan budaya Kurdi di Turki yang tercantum dalam perubahan Konstitusi Turki Bab III pasal 42 membawa dampak bagi hubungan keduanya. Tidak diakuinya eksistensi Kurdi di Turki dengan konsekuensi populasinya cukup besar di Turki dimana etnis Kurdi menempati posisi kedua terbesar jumlah populasinya di Turki dapat memunculkan konflik di antara keduanya. Konflik pun dapat lebih mudah terjadi dengan melihat pola persebaran penduduk Kurdi yang lebih banyak terkonsentrasi di Turki Bagian Tenggara yang berdekatan dengan sebaran penduduk Kurdi di negara lain seperti di Timur Laut Irak, Timur Laut Syria dan Barat Laut Iran yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang cukup intens antar masyarakat Kurdi. Sehingga kebijakan di suatu negara dapat mempengaruhi pandangan dan sikap etnis Kurdi atas kebijakan negara yang didiaminya.

Konflik yang terjadi antara etnis Kurdi dengan Pemerintah Turki selain menyedot hampir sepertiga anggaran nasional Turki dalam usaha penyelesaian konfliknya juga menarik perhatian kalangan internasional dan perhatian yang cukup besar dari kalangan internasional seringkali menghambat langkah Turki untuk memainkan perannya di percaturan dunia, khususnya di Eropa, antara lain dengan belum diterimanya secara penuh Turki dalam Masyarakat Eropa dengan salah satu alasan masih adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Turki.

Kebijakan Turki dalam menyikapi hubungannya dengan etnis Kurdi ini merupakan suatu input bagi hubungan kedua pihak. Akan mengarah kepada sesuatu yang positif bagi hubungan kedua belah pihak atau justru menjadi sebab konflik. Karena itu, dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan penelitian dengan melihat bagaimana kebijakan Turki dalam menyikapi hubungannya dengan etnis Kurdi.

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi?
2. Faktor konflik apa saja yang ada antara pemerintah Turki dan etnis Kurdi serta bagaimana konflik terjadi?
3. Bagaimana prospek hubungan kedua belah pihak di masa depan?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Sehingga tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah dengan cara menyimpulkan dari sejumlah pengetahuan dan data yang ada sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang, fokus masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Identifikasi kebijakan pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antara pemerintah Turki dan etnis Kurdi serta bagaimana konflik itu terjadi.
3. Untuk mengetahui prospek hubungan kedua belah pihak di masa depan.

4. Kerangka Pemikiran

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah memperlihatkan

bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah.

Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta berlaku dalam suatu negara pada umumnya.

Dye memberikan definisi kebijakan sebagai suatu tindakan atau sikap yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka pasti ada tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan definisi kebijakan dari Dye di atas, maka dalam pelaksanaan kebijakannya, Pemerintahan Turki dapat melakukan atau tidak melakukan keputusan yang telah diambilnya terhadap etnis Kurdi dengan mempertimbangkan kepentingan yang akan dicapainya. Dan tanggapan etnis Kurdi terhadap kebijakan itu bisa berupa sesuatu yang positif dimana kebijakan itu dapat diadaptasikan dalam kehidupan mereka namun dapat juga ditolak oleh mereka yang pada akhirnya akan memunculkan konflik.

Dalam interaksi antar etnis menuju integrasi, menurut Hirschman dan Wong, terdapat hambatan yang dihadapi oleh suatu kelompok etnis berinteraksi sosial dengan kelompok etnis lain dalam proses menuju integrasi sosialnya. Hambatan itu dapat dikarenakan adanya perbedaan orientasi, adat istiadat, bahasa, agama, struktur ekonomi, serta partisipasi dalam bidang politik. Untuk kasus etnis Kurdi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya etnis kurdi terintegrasi di Turki antara lain adanya perbedaan dalam pemberian hak politik, hak budaya dan bahasa dimana di Turki dalam perubahan Konstitusi Turki Bab III pasal 42 terdapat pelarangan terhadap penggunaan budaya dan bahasa Kurdi dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa merupakan isu pusat dalam politik etnik dimana bahasa mencerminkan dibolehkannya *multi-identities* dalam suatu komunitas bahkan negara.

Interaksi antara etnis Kurdi dengan pemerintah Turki seringkali dihubungkan dengan permasalahan konflik etnis. Konflik etnis seringkali melibatkan dua atau lebih kelompok etnis. Konflik etnis terutama terjadi

ketika salah satu etnis menjadi etnis dominan yang menguasai negara. Kelompok etnis yang tidak dominan berusaha bertahan dari proses asimilasi atau dominasi dari kelompok etnis dominan. Konflik etnis antara dua atau lebih kelompok etnis yang sama-sama berpegang teguh pada prinsipnya disebabkan oleh kecenderungan masing-masing pihak untuk mencapai hasil yang mutlak (*zero sum outcomes*). Dalam kasus ekstrem, suatu kelompok mungkin ingin melepaskan diri atau mungkin menjadi korban dari *ethnocide* atau *genocide*. Kompromi pada akhirnya sangat sulit dicapai karena perbedaan karakter dari berbagai identifikasi etnis akan membuat konflik etnis meningkat dan mengakar. Semakin lama konflik tersebut berlangsung maka akan semakin meningkat dan biasanya menyebabkan identitas kelompok semakin menguat dan eksklusif. Dan kebijakan suatu pemerintah terhadap berbagai sumber konflik yang mungkin muncul sangat berpengaruh terhadap hubungan pihak-pihak yang berkonflik.

Konflik etnis biasanya merupakan konflik internasional. Seringkali konflik etnis tidak dibatasi oleh batas-batas satu negara saja. Seperti yang terjadi pada etnis Kurdi dimana etnis Kurdi tidak hanya terdapat di Turki saja tetapi juga di Irak, Iran dan Suriah dimana di masing-masing negara masalah terhadap Kurdi ini merupakan masalah yang laten terjadi.

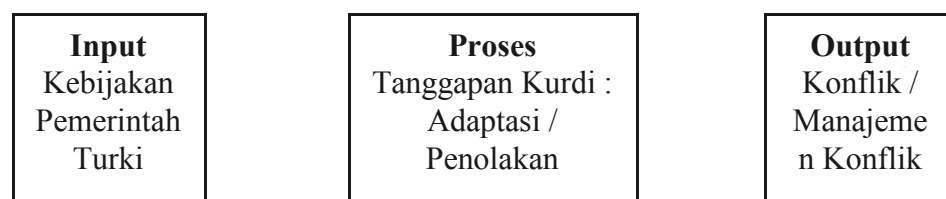
Dan para pemimpin kelompok etnis yang merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dapat mencari dukungan dari pemerintah atau negara tetangga, berharap mendapat perhatian internasional akan konflik yang mereka hadapi, atau setidaknya satu atau lebih negara di sekitar wilayah konflik mereka. Atau bahkan posisi mereka yang kurang menguntungkan ini justru dipergunakan negara atau pihak lain untuk mencapai kepentingan mereka sendiri dengan dalih memperjuangkan posisi tawar etnis yang sedang bertikai. Khusus Isu Kurdi, seringkali Kurdi dijadikan sebagai komoditas tawar dalam permusuhan antar negara yang bertetangga. Contoh kasus yang berhubungan dengan Turki adalah ketika tokoh *Partiya Karkaran Kurdistan* (PKK), Ocalan dalam menghindari kejaran pihak militer Turki melarikan diri ke Suriah dan mengendalikan organisasinya dari Suriah. Dimana Suriah hingga kini dianggap Turki sebagai pelindung perjuangan etnis Kurdi.

Keterlibatan Suriah dalam konflik Kurdi dengan Turki antara lain nampak dalam sengketa wilayah Anatolia (tempat sebagian besar etnis Kurdi menetap di Turki), yang diklaim oleh keduanya sebagai bagian dari negaranya. Suriah dituduh oleh Pemerintah Ankara mensuplai dan melindungi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh PKK.

Suatu etnis minoritas yang mendapat tekanan atas kebijakan-kebijakan suatu negara kemudian akan mencari otonomi luas atau ingin menjadi negara tersendiri, serta berusaha bergabung dengan negara yang dipimpin oleh bangsa mereka sendiri. Dari kondisi ini muncul prinsip penentuan nasib sendiri (*self determination*), yakni hak yang dimiliki oleh suatu kelompok etnis, budaya, berdasarkan identitas wilayah maupun sejarah yang dimilikinya untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan pilihan politik yang dipilihnya. Di sisi lain, sebagai suatu negara yang berdaulat, Turki akan berusaha untuk mempertahankan integritas wilayahnya. Hal ini selain didasari oleh kesadaran akan nasionalisme yang telah dicetuskan sejak awal oleh pendiri negara ini juga untuk mengantisipasi meluasnya potensi konflik yang ada. Disini dampak dari kebijakan suatu negara atau pihak tertentu terhadap pihak lain dalam manajemen konflik perlu diperhatikan.

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diterangkan di atas, berikut ini akan dipaparkan kerangka pemikiran untuk melihat keterhubungan diantara kedua pihak berdasarkan konsep dasar David Easton.

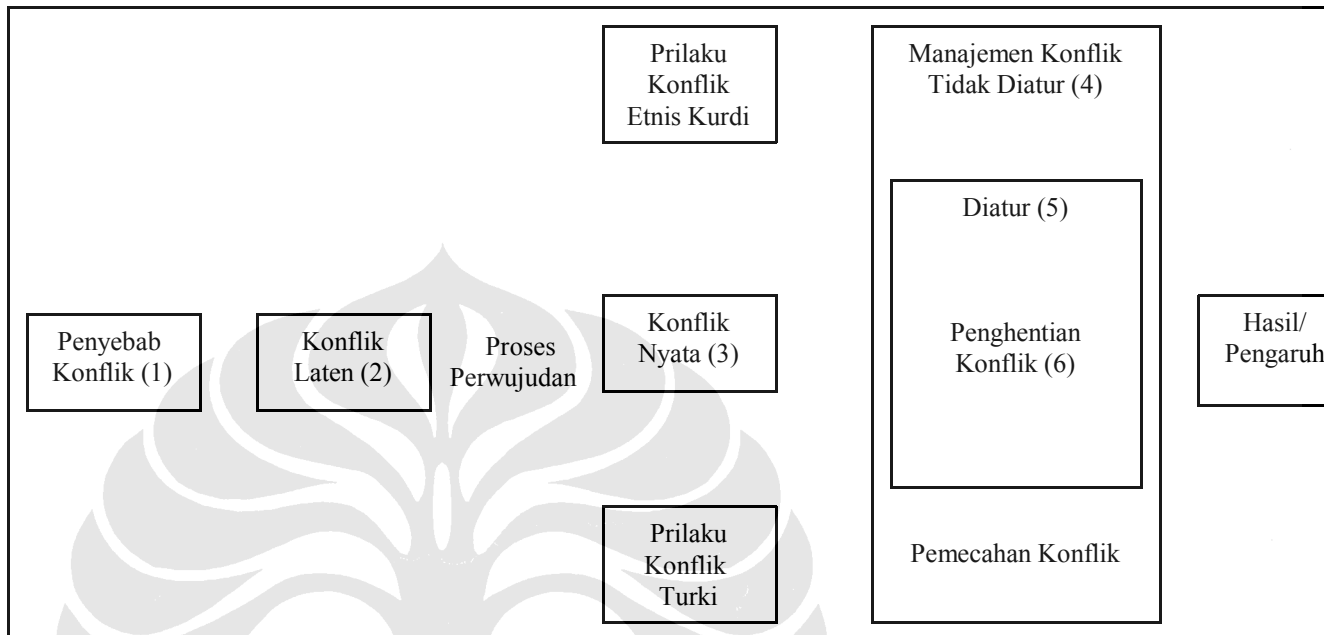
Gambar I.1 Kerangka Pemikiran



Feedback

Untuk itu akan digambarkan suatu model proses terjadinya konflik sebagai implikasi terhadap diberlakukannya suatu kebijakan yaitu :

Gambar I.2 Model Proses Terjadinya Konflik



Skema 1.1 Kerangka Pemikiran

Konflik laten disini adalah situasi dimana dua atau lebih aktor berusaha mencapai tujuannya baik tujuan yang sama maupun yang bertentangan dengan aktor lain atau memilih alat/sarana yang juga bertentangan. Konflik nyata ada ketika tujuan/alat yang bertentangan itu dapat dirasakan oleh aktor-aktor yang ada dan mendesak mereka menggunakan berbagai pengaruh dalam setiap aksinya. Manajemen konflik yang tidak diatur rentan terhadap penggunaan *force* sedangkan yang teratur berusaha menghindari penggunaan *force* dan ancaman.

Keterangan :

1. Penyebab terjadinya konflik : Di sini, penyebab terjadinya konflik dapat dikarenakan adanya penolakan atau tidak terjadinya adaptasi yang positif dari etnis Kurdi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki. Salah satunya, akibat dari pengadopsian beberapa kebijakan dari Eropa sejak tahun 1923, segala bentuk pengungkapan diri bagi kaum Kurdi (juga kelompok-kelompok minoritas lain di Turki) yang menunjukkan identitas etnik yang unik direpresi. Kurdi tidak punya hak berpolitik (untuk beberapa lama), tidak punya akses pendidikan, dan informasi.
2. Konflik laten antara lain setengah dari populasi etnis Kurdi di dunia, yakni 10-12 juta orang diperkirakan tinggal di Turki. Dengan jumlah populasi yang cukup besar menyebabkan kepentingan Kurdi perlu diperhatikan karena akan memunculkan situasi ketika pemerintah Turki/etnis Kurdi berusaha mencapai tujuannya baik tujuan yang sama maupun yang bertentangan atau bahkan memilih alat/sarana yang juga bertentangan. Ditambah lagi, Kurdi adalah suku yang punya adat istiadat sendiri.
3. Konflik nyata : berupa konflik bersenjata yang terjadi antara etnis Kurdi dan pemerintah Turki. Sejak tahun 1984, PKK telah mengumumkan perang gerilya terhadap Turki. Konflik bersenjata sampai awal tahun 2008 masih terjadi meskipun telah melakukan beberapa kali gencatan senjata.
4. Manajemen konflik yang tidak teratur : berupa kebijakan-kebijakan pemerintah Turki dalam menyikapi konflik dimana kebijakan itu rentan terhadap penggunaan *force*.
5. Manajemen konflik teratur : dimana pemerintah Turki berusaha menghindari penggunaan *force* dan ancaman dalam menyikapi konflik yang ada dengan etnis Kurdi.
6. Penghentian konflik dilaksanakan keduanya dengan menghentikan serangan dalam konflik dan berusaha menjalin hubungan kembali diantara mereka melalui cabang politik maupun ekonomi. Antara lain dengan meningkatkan komunikasi, toleransi, dialog serta pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas.

7. Pengaruhnya terhadap hubungan kedua pihak sangat berkaitan erat dengan posisi ingin diterimanya Turki dalam Masyarakat Eropa

5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai konflik antara etnis Kurdi dengan pemerintah Turki adalah penelitian yang ditulis oleh Fahmi Jamaludin dalam tesisnya yang berjudul ” Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Mengatasi Masalah Konflik Etnis dengan Bangsa Kurdi.”

Dalam tesisnya tersebut, dibahas mengenai perkembangan masalah Kurdi yang memaparkan kondisi umum bangsa Kurdi, PKK dan perjuangan bangsa Kurdi dan hubungan PKK dengan Suriah. Namun, inti dari pembahasannya yaitu mengenai kebijakan luar negeri dalam masalah Kurdi sejak tahun 1980 dan hubungan Turki dengan negara tetangganya yang sama-sama memiliki permasalahan dengan Kurdi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pengumpulan data hanya kepustakaan dan dilakukan di Kedutaan Besar Turki di Indonesia.

Berbeda dengan tesis dari Fahmi Jamaludin, dalam tesis ini akan menggunakan metode studi kasus dan akan membahas mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi terutama setelah adanya Perjanjian Sevres. Kemudian akan dibahas mengenai berbagai keputusan atau kebijakan yang diambil Turki melalui konstitusinya dalam hubungannya dengan etnis Kurdi. Dalam tesis ini akan dilihat tanggapan-tanggapan etnis Kurdi atas kebijakan yang ada, apakah diadaptasi oleh etnis Kurdi atau justru ditolak yang pada akhirnya akan memunculkan konflik. Konflik yang akan dilihat adalah konflik laten maupun konflik terbuka yang telah terjadi di antara keduanya. Khususnya adalah konflik dengan etnis Kurdi yang ingin melakukan separatisme dari Turki.

6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dipilah ke dalam lima bab, setiap bab disusun sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pembahasan. Paparannya dapat dijabarkan ke dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab Pendahuluan dimana di dalamnya mencakup latar belakang masalah, fokus masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan penelitian sebelumnya. Secara keseluruhan, di bab ini merupakan penjelasan secara singkat garis besar dari isi penelitian.

Bab II merupakan bab Landasan Teori dimana di dalamnya terdiri dari berbagai referensi berupa teori-teori dari para ahli yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel di majalah dan koran, serta sumber-sumber lain yang ada kaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas dan nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah sesuai data yang ada.

Bab III merupakan bab metodologi penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian dan terdiri dari batasan terhadap obyek masalah penelitian dan karakteristik data yang ada pada obyek masalah penelitian berupa dokumen, rekaman arsip, dan wawancara. Kemudian dijelaskan juga mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, unit analisis penelitian, metode pengumpulan data yaitu dengan cara telaah data sekunder melalui studi kepustakaan serta metode analisis data dengan model interaktif.

Bab IV merupakan bab gambaran umum Turki dan Kurdi yang mendeskripsikan latar belakang sejarah, aspek geografis, pemerintahan, ekonomi dan isu-isu transnasional Turki dan Kurdi.

Bab V merupakan bab yang mendeskripsikan kebijakan pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi dan juga mendeskripsikan tanggapan etnis Kurdi di Turki atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Turki. Tanggapan ini dapat berupa respon positif maupun respon negatif yang pada akhirnya justru memunculkan konflik antara kedua belah pihak. Pada bab ini juga akan dijelaskan berbagai prospek hubungan kedua belah pihak di masa depan.

Bab VI merupakan bab Simpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Selain Simpulan juga dipaparkan beberapa saran mengenai masalah penelitian yang ada dan saran untuk penelitian selanjutnya.

